

**PENCABULAN TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM, HAK ASASI MANUSIA (HAM), DAN ISLAM**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1  
pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum**

**Oleh:**

**ATIMATUL KHUSNA**

**C100170264**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PENCABULAN TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM, HAK ASASI MANUSIA (HAM), DAN ISLAM**

**PUBLIKASI ILMIAH**

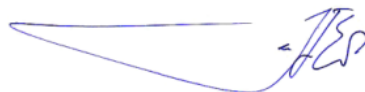
oleh:

**ATIMATUL KHUSNA**

**C 100 170 264**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing,



**(Muchamad Iksan, S.H., M.H.)**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PENCABULAN TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM, HAK ASASI MANUSIA (HAM), DAN ISLAM**

**OLEH  
ATIMATUL KHUSNA  
C 100 170 264**

**Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari Jum'at, 23 Juli 2021  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

**Dewan Penguji:**

1. Muchamad Iksan, S.H., M.H.  
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Kuswardani, S.H., M. Hum.  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Bambang Sukoco, S.H., M. Hum.  
(Anggota II Dewan Penguji)



**Dekan**

**Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.**

**NIP. 196812261993031002 / NIDN. 0026126801**

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis ataupun diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 23 Juli 2021

Penulis



**ATIMATUL KHUSNA**

**C100170264**

## **PENCABULAN TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM, HAK ASASI MANUSIA (HAM), DAN ISLAM**

### **Abstrak**

Pencabulan merupakan perbuatan yang tidak senonoh dalam bidang seksual, seperti perbuatan meraba-raba kemaluan yang dilakukan di muka umum yang menimbulkan rangsangan berahi. Korban dari pencabulan seringkali adalah anak karena tidak berdaya dan dimanfaatkan pelaku untuk stimulasi seksual, sehingga mengakibatkan kondisi psikologis anak maupun perkembangan lainnya terganggu. Maka perlu adanya perlindungan hukum yang mengaturnya. Tindak pidana pencabulan terhadap anak menganut *asas lex specialis derogat lex generalis*. Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) anak sebagai pelaku mengupayakan penyelesaian perkara secara diversi yang diatur secara khusus. Segala macam tindakan diskriminasi maupun lainnya yang merupakan bentuk dari pelanggaran HAM tidak boleh diabaikan, dapat dilakukan melalui instrumen internasional HAM dan instrumen hukum nasional. Dalam hukum pidana Islam, pencabulan harus dijatuhi hukum pidana (*jarimah*) yang dianjar dengan hukuman *ta'zir* karena tidak adanya ketentuan sanksi secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadist. Penulisan menggunakan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis-normatif dengan cara meneliti bahan pustaka (*library research*) atau data sekunder dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur.

**Kata Kunci:** pencabulan, anak, hukum, ham, islam

### **Abstract**

Obscenity is an act that is indecent in the sexual field, such as the act of groping the genitals which is carried out in public that causes lustful stimulation. Victims of sexual abuse are often children because they are powerless and used by perpetrators for sexual stimulation, resulting in the child's psychological condition and other developments being disrupted. So there is a need for legal protection that regulates it. The crime of sexual abuse against children adheres to the principle of *lex specialis derogat lex generalis*. The juvenile criminal justice system as the perpetrator seeks to resolve cases in a specially regulated diversionary manner. All kinds of acts of discrimination or other forms of human rights violations should not be ignored, they can be carried out through international human rights instruments and national legal instruments. In Islamic criminal law, sexual immorality must be subject to a criminal law (*jarimah*) which is rewarded with a *ta'zir* penalty because there is no explicit sanction provision in the Qur'an and Hadith. Writing using the research method used is a juridical-normative research method by examining library materials or secondary data by conducting a search on regulations and literature.

**Keywords:** obscenity, children, law, human rights, islam

## 1. PENDAHULUAN

Perilaku yang menyimpang dari norma biasanya akan menjadikan suatu permasalahan baru di bidang hukum dan merugikan masyarakat (Waluyo, 2000). Kejahatan yang dilakukan manusia menjadi masalah yang mengakibatkan dirinya merasa kehilangan arah dan tujuan. Ia punya ambisi, keinginan dan tuntutan yang dibalut nafsu, karena hasrat yang berlebihan gagal dikendalikan dan dididik, ini mengakibatkan masalah yang dihadapinya makin banyak dan beragam (Wahid & Irfan, 2001).

Masalah kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan kemanusiaan (*crime againts humanity*) atau kesusilaan (Wahid & Irfan, 2001). Tingginya angka kasus kejahatan kesusilaan yang diberitakan baik yang ada di media cetak ataupun elektronik, seperti pencabulan terhadap anak, menunjukkan bahwa tujuan dari hukum belum terwujud dengan sepenuhnya.

Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan (CATAHU) 2019, kekerasan di ranah publik dan komunitas mencapai angka 3.915 kasus (28%), di mana kekerasan seksual menempati peringkat pertama sebanyak 2.521 kasus (64%), diikuti berturut-turut: kekerasan fisik 883 kasus (23%), kekerasan psikis 212 kasus (5%), dan kategori khusus yakni trafiking 158 kasus (4%), dan kasus pekerja migran 141 kasus (4%). Tiga Jenis kekerasan yang paling banyak pada kekerasan seksual di ranah publik dan komunitas adalah pencabulan (1.136 kasus), perkosaan (762 kasus), dan pelecehan seksual (394 kasus).

Sementara itu Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melaporkan pada Januari hingga Oktober 2019, angka kasus kekerasan seksual pada anak di sekolah meningkat. KPAI mencatat, terdapat 17 kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dengan korban 89 anak, terdiri dari 55 perempuan dan 34 laki-laki. Dari 17 kasus tercatat tersebut, 88 persennya dilakukan guru dan 22 persen dilakukan kepala sekolah. 64,7 persen atau setara 11 kasus terjadi di SD, 23,53 persen atau 4 kasus di SMP, dan 11,77 persen atau 2 kasus di SMA (Lokadata, 2020).

Persentase pencabul pria mencabuli anak perempuan adalah 97,5%, pencabul pria mencabuli anak laki-laki adalah 78,7%, dan pencabul perempuan mencabuli anak perempuan merupakan minoritas karena banyak kasus tidak dilaporkan. Pencabul laki-laki membutuhkan kontak seksual yang eksplisit, tetapi tidak mampu untuk mempertahankan hubungan seksual yang stabil dan berlanjut dengan partnernya sendiri (Indriati, 2001).

Cabul merupakan perbuatan yang tidak senonoh dalam bidang seksual, misalnya perbuatan meraba-raba kemaluan yang dilakukan di muka umum yang menimbulkan rangsangan berahi (Hamzah, 2009). Korban dari pencabulan seringkali adalah anak, dimana anak tersebut yang tidak berdaya dimanfaatkan pelaku untuk stimulasi seksual, sehingga kondisi psikologis anak maupun perkembangan lainnya akan terancam. Untuk mewujudkan peran anak dengan baik, maka tumbuh dan kembang anak perlu diperhatikan sejak dini. Anak hendaknya diperlakukan dengan baik dalam lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian (Huraerah, 2006). Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI tahun 1945 bahwa Negara Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai negara yang pancasilais, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan, Indonesia memiliki banyak peraturan yang secara tegas memberikan upaya perlindungan anak (Djamil, 2013).

Dalam konteks Hukum Pidana Islam, tindak pidana sering juga disebut dengan istilah *jarimah* (Tongat, 2008). Hukum Pidana Islam mendefinisikan tindak pidana adalah perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut syara' yang pelakunya dapat diancam dengan pidana hudud, qisas dan diyat serta ta'zir. *Jarimah hudud*, lebih lanjut meliputi perbuatan maksiat yang "besar", yang sudah pasti dan tertentu bentuknya sebagaimana yang telah disepakati oleh *fuqaha'* ada tujuh macam, yaitu: Zina, *qadhaf* (menuduh orang berbuat Zina), mencuri, minum khamar, merampok, memberontak dan murtad (Surya, 2018).

Zina dalam Hukum Islam diartikan dengan hubungan kelamin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan (Abdurrahman, 1992). Menurut beberapa pendapat dari kalangan Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Zhahiri'yah, Syia'ah

Zaidiyah, murid Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf bahwasannya untuk hukuman bagi pelakunya adalah harus dijatuhkan hukuman *hadd* dengan alasan tidak ada *syubhat* (Muslich, 2005). Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an :

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّلَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: "*Dan janganlah kamu hampiri akan pekerjaan zina itu, sesungguhnya (perbuatan zina itu) sangat keji dan jalan yang sesat*". (QS. Al-Isra': 32).

Seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana zina harus memenuhi unsur-unsur dari persetubuhan yang diharamkan dan adanya kesengajaan atau niat melawan hukum, sedangkan tindak pidana pencabulan adalah perbuatan melawan hukum yang tidak sampai masuknya kelamin laki-laki ke kelamin perempuan.

## 2. METODE

Metode pendekatan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian yuridis-normatif. Penelitian yuridis-normatif ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan (Nazir, 2003).

Penelitian ini dalam menganalisa data menggunakan metode analisis kualitatif. Dalam menganalisa serta mengolah data yang terkumpul dari bahan pustaka (undang-undang, dokumen, buku, dan sebagainya), yang bersifat kualitatif. Dianalisis secara kualitatif untuk melihat hubungan dan kesesuaian antara data kemudian diambil kesimpulan. Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu data yang bersifat umum untuk dilihat permasalahan dalam kasus.



### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Pencabulan Terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Positif

Kekerasan seksual merupakan bentuk kejahatan yang patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan kemanusiaan (*crime againsts humanity*) atau kesusilaan. Menurut Moeljatno Pencabulan dikatakan sebagai segala perbuatan yang melanggar asusila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelaminnya. Jenis-jenis kekerasan seksual dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. *Sadistic rape*, Pencabulan Sadistik, artinya pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku pencabulan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atau alat kelamin dan tubuh korban.
- b. *Angea rape* yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan.
- c. *Dononation rape* yakni suatu pencabulan yang terjadi seketik pelaku mencoba untuk gigih, atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban.
- d. *Seduktive rape* adalah suatu pencabulan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.
- e. *Victim Precipitated rape* yakni pencabulan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.
- f. *Exploitation rape* yaitu perncabulan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yng diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial

Bentuk-bentuk kekerasan yang dialami anak dapat berupa tindakan-tindakan kekerasan, baik secara fisik, psikis maupun seksual (*sexual abuse*) (Gultom, 2013). Bentuk kekerasan terhadap anak dan perempuan dapat diklasifikasikan menjadi 4 macam, yaitu (Safrina, 2010):

- a. *Emotional Abuse* (kekerasan emosional), dapat terjadi apabila orang tua yang mengetahui keinginan anaknya untuk meminta perhatian namun orang tua tidak memberi apa yang diinginkan anaknya tetapi justru mengabaikannya. Anak akan mengingat semua kekerasan emosional jika kekerasan emosional berjalan konsisten.
- b. *Verbal Abuse* (kekerasan dengan perkataan), lahir akibat bentakan, makian orang tua terhadap anak, ketika anak meminta sesuatu kepada orang tua tidak memberikan justru membentakinya. Saat si anak mengajak berbicara orang tua tidak menanggapi justru menghardik dengan bentakan, anak akan mengingat semua kekerasan verbal ini jika terjadi dalam satu periode tertentu yaitu beberapa bulan atau tahun.
- c. *Physical Abuse* (kekerasan fisik), ini terjadi pada saat anak menerima pukulan dari orang tua. Kekerasan jenis ini akan diingat anak yang berakibat akan meninggalkan bekas pada tubuh si anak, karena luka yang berbekas akan terus mengingatkan si anak terhadap peristiwa yang menyebabkan terjadinya luka tersebut.
- d. *Sexual Abuse* (kekerasan seksual), kekerasan jenis ini terjadi jika ada aktivitas seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap seorang anak.

Dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak berlaku asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* artinya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum yang bersifat umum dapat dikesampingkan dengan hukum yang bersifat khusus yaitu Undang-Undang yang bersifat khusus. Pencabulan dalam hukum positif diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu :

Peraturan ini secara tidak langsung disebut sebagai *Lex Generalis* artinya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai aturan hukum yang bersifat umumnya. Kejahatan di bidang kesusilaan adalah kejahatan yang berhubungan dengan masalah seksual. Pencabulan dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam Buku II Bab XIV Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP, terdiri dari:

- a. Kejahatan perkosaan berbuat cabul atau perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan (Pasal 289);

- b. Kejahatan perbuatan cabul pada orang yang pingsan, pada orang yang umurnya belum 15 tahun atau belum waktunya dikawin (Pasal 290);
- c. Kejahatan perbuatan cabul sesama kelamin, pada orang yang belum dewasa (Pasal 292);
- d. Kejahatan menggerakkan orang untuk berbuat cabul dengan orang yang belum dewasa (Pasal 293);
- e. Kejahatan berbuat cabul dengan anaknya, anak dibawah pengawasannya dan lain-lain yang belum dewasa (Pasal 294);
- f. Kejahatan pemudahan berbuat cabul bagi anaknya, anak tirinya dan lain-lain yang belum dewasa (Pasal 295);
- g. Kejahatan pemudahan berbuat cabul sebagai mata pencaharian atau kebiasaan (Pasal 296);

Pencabulan terhadap anak kerap kali berhubungan dengan Pasal 287 (1) KUHP mengatur tentang persetubuhan, sebab pada pasal tersebut menjelaskan kejahatan seksual yang korbannya adalah anak yang menyatakan *“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bawa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”*

Peraturan ini secara tidak langsung disebut sebagai *Lex Specialis* artinya Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai aturan hukum yang bersifat khusus yang dapat mengesampingkan KUHP sebagai aturan umumnya. Ketentuan dalam aturan hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan diubah kedua kalinya dengan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang.

Dampak dari kejahatan terhadap kesusilaan dapat mengancam keselamatan dan psikologis terutama pada anak serta dapat mempengaruhi proses pertumbuhan ke arah kedewasaan seksual lebih dini, sehingga peranan negara sebagai negara hukum dalam hal ini sangat dibutuhkan. Secara khusus perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual terdapat payung hukum yang dapat melindunginya yaitu dalam Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *“Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya: a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan; b. rehabilitasi sosial; c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.”*

Tindak pidana kesusilaan terhadap anak serta ketentuan pidananya diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak antara lain pada Pasal 76D *“Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”* dan Pasal 76E *“Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”*. Pelaku tindak pidana kesusilaan, sudah sepatutnya diberikan sanksi yang setimpal oleh aparat penegak hukum melalui proses hukum yang sah. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Pasal 81 ayat (1) *“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling*

*banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).” dan Pasal 82 ayat (1) “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”*

Peraturan ini secara tidak langsung disebut sebagai *Lex Specialis* artinya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai aturan hukum yang bersifat khusus yang dapat mengesampingkan KUHP sebagai aturan umumnya pada kasus kekerasan seksual pada anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 5 :*“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga.”*

Kemudian Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berbunyi *“Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga”*. Sedangkan dalam hal pemberian hukuman pidana (sanksi) terhadap tindak kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga yang dalam hal ini memberikan perlindungan bagi korban (anak) diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 46 *“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”* Pasal 47 *“Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”* dan Pasal 48 *“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurangkurangnya selama 4*

*(empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”*

Bentuk perlindungan dan pendampingan terhadap anak sebagai korban pencabulan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan sidang pengadilan dan eksekusi telah diatur secara terperinci dalam KUHAP. Sedangkan anak sebagai pelaku juga perlu mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dengan mengupayakan penyelesaian perkara secara diversi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

### **3.2 Pencabulan Terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)**

Setiap manusia mempunyai hak asasi dan mempunyai tanggung jawab yang timbul sebagai akibat perkembangan kehidupannya dalam bermasyarakat serta berkewajiban dalam menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan kemanusiaan, serta keharmonisan kehidupan (Marlina, 2009).

Secara yuridis konsep mengenai Hak Asasi Manusia telah diakui secara universal yang ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Resolusi 217 A III. Resolusi ini mengatur mengenai *Universal Declaration of Human Rights* atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang dapat disingkat sebagai DUHAM. DUHAM ini kemudian menjadi sebuah standar umum untuk keberhasilan perlindungan HAM yang proliferasinya harus dipromosikan oleh aktor negara dan aktor non-negara seperti masyarakat, badan-badan sosial, atau LSM. DUHAM ini juga hadir untuk mengajarkan dan memberikan pendidikan dalam angka menjunjung nilai-nilai tertinggi dalam menghargai hak-hak dan kebebasan universal setiap manusia, dan setiap bangsa-bangsa di dunia.

Dalam kerangka internasional yang lain, PBB juga memiliki *United Nations Children's Fund* (UNICEF), atau badan yang befokus untuk memperhatikan kesejahteraan anak-anak. Dalam badan ini anak-anak dipandang sebagai

kelompok rentan yang seringkali menjadi korban dalam keadaan perang. Anak-anak seringkali mengalami pengasingan, pemerkosaan, dan bahkan dibunuh. Maka dari itu, UNICEF memberikan perspektif baru untuk melindungi hak-hak anak dengan menekankan bahwa anak-anak merupakan aktor penting yang dapat mempengaruhi dunia karena merupakan “*natural agents of change*”, dan mediator antar generasi. Maka dari itu hak-hak anak terutama keamanan dan akses terhadap pendidikan harus disediakan oleh berbagai aktor baik negara ataupun non-negara (Kury, 2016).

Pemerintah Indonesia menandatangani *Convention on The Rights of The Child* (konvensi tentang hak-hak anak) pada tanggal 26 Januari 1990 di New York, Amerika Serikat sebagai hasil Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diterima pada tanggal 20 November 1989. Selaras dengan itu, berdasarkan pertimbangan pemerintah Indonesia menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention The Rights of The Child* (konvensi tentang hak-hak anak). Dengan keberadaan deklarasi tersebut diharapkan semua pihak baik individu, orang tua, organisasi sosial, pemerintah, dan masyarakat mengakui hak-hak anak. Konvensi hak anak tersebut selanjutnya juga mengatur sistem kesejahteraan anak sebagai serangkaian upaya mensejahterakan anak dengan perlindungan yang menyeluruh, tidak hanya sekedar pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan dasar anak tetapi juga menjamin pemenuhan terhadap keseluruhan aspek hak anak termasuk mencegah dan merespon segala bentuk kekerasan, perlakuan salah, penelantaran dan eksploitasi terhadap anak (Anshor, 2017).

Pancasila hadir sebagai ideologi kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai acuan nilai kemanusiaan yang bermoral. Maka dalam sila ke 2 Pancasila dikatakan bahwa : “*Kemanusiaan yang Adil dan Beradab*”. Dalam sila tersebut mengandung butir-butir yaitu: “1) mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia; 2) saling mencintai sesama manusia; 3) mengembangkan sikap tenggang rasa dan tepo seliro; 4) tidak semena-mena terhadap orang lain; 5) menjunjung tinggi nilai kemanusiaan; 6) gemar melakukan kegiatan kemanusiaan; 7) berani membela kebenaran dan keadilan; dan (8) bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh

*umat manusia, karena itu dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain (Gunawan, 2021).” Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” dan pada Pasal 28D ayat (1) mengatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” serta Pasal 28G ayat (1) juga menjelaskan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.*

Perlindungan anak merupakan tuntutan hukum yang tidak boleh diabaikan dalam tatanan nasional dan global baik dari segala macam tindakan diskriminasi maupun lainnya yang merupakan bentuk dari pelanggaran HAM. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa Pasal 33 (1) *“setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya”* Pasal 52 (1) *“Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.”*(2) *“Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan”* Pasal 58 (1) *“Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.”*(2) *“Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan bentuk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman.”*

Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang menjamin hak korban pelanggaran Hak Asasi



Manusia atas perlindungan fisik dan mentalnya berbunyi: (Iksan, 2012) (1) *Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang beradab berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan pihak manapun;* (2) *Perlindungan sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1) wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma.* (3) *Ketentuan mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.* Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2002 tentang Tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, berbunyi: “*Perlindungan yang diatur dalam Pasal 2 meliputi: a. Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental; b. Perahasaan identitas korban atau saksi; c. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.*”

### **3.3 Pencabulan Terhadap Anak dalam Perspektif Islam**

Ajaran Islam baik secara eksplisit maupun implisit mencerminkan kehidupan sosial yang ideal, dimana setiap orang dapat memajukan kesejahteraannya ke tingkat yang optimal (Ridho, 2015). Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari agama Islam. Sebagai sistem hukum yang mempunyai beberapa istilah kunci yang perlu dijelaskan lebih dahulu, sebab kadangkala membingungkan karena tidak diketahui perisih makna seperti istilah (1) hukum, (2) hukum dan ahkam, (3) syari’at/syari’ah, (4) Fiqh dan beberapa kata lain yang berangkaian dengan kata tersebut (Ali, 1993).

Aktivitas seksual yang diperbolehkan dalam islam yaitu apabila sudah ada ikatan janji suci perkawinan yang sah sesuai syari’at islam dengan berdasarkan firman Allah SWT dalam surat As-Syura ayat 11 :

فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَمِنَ الْاَنْعَامِ اَزْوَاجًا يَذُرُكُمْ فِيْهَا لِيَسْكُنُوْا فِيْهَا  
 شِيْءًا وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيْرُ

Artinya: “(Allah) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, dan dari jenis hewan ternak pasangan-pasangan (juga). Dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Dan Dia Yang Maha Mendengar, Maha Melihat” (QS. As-Syura : 11)

Hukum pidana Islam tidak memahami istilah tindak pidana pencabulan. Hal ini disebabkan segala tindakan yang berkaitan dengan nafsu birahi dicirikan sebagai tindakan zina sedangkan pencabulan itu sendiri memiliki makna yang kontra dengan zina dan pencabulan tidak bisa dipandang sebagai perbuatan yang diancam dengan *hadd*. Sesungguhnya *hadd* dapat dijatuhkan apabila telah memenuhi unsur-unsur persetubuhan yang diharamkan dan terdapat kesengajaan atau niat yang melawan hukum. Segala perbuatan asusila yang dilakukan diluar perkawinan merupakan tindakan zina, sedangkan arti pencabulan mempunyai arti yang berbeda dengan zina (Warjiyati, 2019). Sehingga pencabulan merupakan salah satu perbuatan kejahatan seksual yang diganjar dengan hukuman *ta'zir*. Sebab hukum pencabulan dalam Al-Qur'an dan Hadist tidak ditentukan secara jelas sehingga hukumannya diserahkan kepada ulil amri dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan, dan pengutamakan tujuan hukum Islam, serta mempertimbangkan akal sehat agar kemaslahatan umat terwujud.

#### **4. PENUTUP**

##### **4.1 Kesimpulan**

Tindak pidana pencabulan terhadap anak berlaku asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum yang bersifat umum (*Lex Generalis*) dapat dikesampingkan dengan hukum yang bersifat khusus (*Lex Specialis*) yaitu Undang-Undang yang bersifat khusus antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam prosedur peradilan hukumnya pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan sidang pengadilan dan eksekusi dalam kasus pencabulan terhadap anak diatur dalam KUHP sedangkan anak dalam perkara anak mengupayakan penyelesaian

perkara secara diversi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Instrumen pengaturan mengenai HAM mengacu pada instrumen internasional HAM yaitu *Universal Declaration of Human Rights* atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang dapat disingkat sebagai DUHAM. PBB juga memiliki *United Nations Children's Fund* (UNICEF), atau badan yang befokus untuk memperhatikan kesejahteraan anak-anak. Sebagai instrumen hukum nasional Pemerintah Indonesia menandatangani *Convention on The Rights of The Child* (konvensi tentang hak-hak anak) yang dicetuskan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa sehingga pemerintah Indonesia menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention The Rights of The Child* (konvensi tentang hak-hak anak). Pengaturan terkait HAM di Indonesia telah ada sejak di sahkannya Pancasila. Selain itu hierarki UUD 1945 telah mengatur secara rinci tentang hak asasi manusia pada Pasal 27 sampai dengan Pasal 28J. Dalam kerangka perlindungan terhadap anak atas pelanggaran HAM diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusi yang menjamin hak korban pelanggaran Hak Asasi Manusia atas perlindungan fisik dan mentalnya.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam perspektif Islam termasuk ke dalam tindak pidana kategori *jarimah ta'zir*, karena tidak adanya ketentuan sanksi secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadist, sehingga bentuk sanksi terhadap pelaku tindak pidana diserahkan kepada ulil amri dengan memperhatikan kemaslahatan umat dan asas keadilan

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan analisis penulis maka dalam penanganan perkara pidana terkait anak yang berhadapan dengan hukum terkhusus kejahatan pencabulan tidak hanya memfokuskan pada pemberian sanksi terhadap pelaku, tetapi ada yang lebih penting yaitu perlindungan terhadap korban yang jelas mengalami kerugian dan trauma yang mendalam. Sehingga hak-hak korban perlu adanya perlindungan dan jaminan, salah satunya bantuan hukum yang perlu diberikan sejak anak terlibat dalam perkara pidana.

Berdasarkan hasil analisis penulis terhadap berbagai fenomena pencabulan anak yang ada, penulis berpendapat bahwasannya dalam rangka untuk melindungi hak-hak anak di Indonesia, pemerintah beserta lembaga pembuat undang-undang harus mempertimbangkan berbagai aspek seperti hukum positif, perspektif internasional, dan perspektif islam dalam rangka pembuatan regulasi yang lebih kuat. Disamping itu problematika pencabulan anak di Indonesia tidak terlepas dari berbagai aspek seperti norma, nilai, dan agama. Sehingga perspektif islam dapat menjadi acuan untuk memperkuat kerangka regulasi yang akan dibuat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 1992, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, alih bahasa H. Wadi, Jakarta : Rineka Cipta.
- Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Muhammad Daud, 1993, *Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Anshor, Maria Ulfah, 2017, *Memutus Rantai Ketidakadilan Global Care dalam Pengasuhan Anak Tenaga Kerja Indonesia Perempuan TKIP*. Edisi pertama, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Catatan Tahunan Komisi Nasional Perempuan Tahun 2019, “*Korban Bersuara, Data Bicara Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara*”, diunduh hari Jum’at, 30 Oktober 2020, pukul 05.30 WIB
- Djamil, M. Nasir, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Etty Indriati, "Child Sexual Abuse : Tinjauan Klinis Dan Psikologis", *Jurnal Berkala Ilmu Kedokteran*, volume 33, Nomor 2 (2001).
- Gultom, Maidin, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama.
- Hamzah, Andi, 2009, *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Huraerah, Abu, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa Cendekia.
- Iksan, Muchamad, 2012, *Hukum Perlindungan Saksi dalam Peradilan Pidana Indonesia*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Imam Gunawan, “*Merevitilasi Kepemimpinan Pancasila dalam Bidang Pendidikan*”, Malang Jawa Timur, artikel Ilmiah diakses hari Kamis, 10 Juni 2021 pukul 03.09 WIB

[https://r.search.yahoo.com/\\_ylt=AwrPiBfoLeRglDAAGGvLQwx.;\\_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1625595497/RO=10/RU=http%3a%2f%2fap.fip.um.ac.id%2fwcontent%2fuploads%2f2016%2f03%2f5ImamGunawan.pdf/RK=2/RS=ZhYHa4ApXGIolmF0u4Rhc7BRcNc-](https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrPiBfoLeRglDAAGGvLQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1625595497/RO=10/RU=http%3a%2f%2fap.fip.um.ac.id%2fwcontent%2fuploads%2f2016%2f03%2f5ImamGunawan.pdf/RK=2/RS=ZhYHa4ApXGIolmF0u4Rhc7BRcNc-)

Kury, Helmut, dkk, 2016, *“Women and Children as Victims and Offenders: Backgorund, Prevention, Reintegration*, Springer.

Lokadata, Jum’at 10 Januari 2020 20:17 WIB, 2020 Kekerasan Pada Anak Tak Menurun, dalam <https://lokadata.id/artikel/2020-kekerasan-pada-anak-tak-menurun>, diunduh pada Kamis 05 November 2020, pukul 14:40 WIB

Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama.

Miftahur Ridho, ‘Islamic Perspective on Child Protection’, *Jurnal Lentera*, Volume IX, Nomor 2, (2015)..

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi pasal*, Jakarta: Bumi Aksara.

Nazir, M., 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Perserikatan Bangsa-bangsa, 1948, *Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia*, Dalam [https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--\\$R48R63.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf), diunduh pada Rabu 16 Juni 2021, Pukul 13:35

Rahmi Safrina dkk, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga’, *Jurnal Hukum*, Mercatoria Volume 3, Nomor 1, (2010) .

Sarah Surya, ‘Klasifikasi Tindak Pidana Hudud Dan Sanksinya Dalam Perspektif Hukum Islam’, *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, Volume 2, Nomor 2, (2018) <<http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>>.

Sri Warjiyati, ‘Penerapan Asas Legalitas Dalam Kasus Penanganan Pencabulan Anak Di Bawah Umur’, *Jurnal Hukum Pidana Islam*, Volume 5, Nomor 1, (2019).

Tongat, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press.

Waluyo, Bambang, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Wahid, Abdul & Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: PT Refika Aditama.